



Pemerintah Kabupaten Kebumen

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

(0287) 383349



kominfo@kebumenkab.go.id



kominfo.kebumenkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian tahun 2025, sekaligus gambaran capaian kinerja.

LKjIP ini memuat capaian kinerja utama, pelaksanaan program dan kegiatan, analisis keberhasilan maupun kendala, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2021–2026.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun berikutnya.

Kebumen, 28 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Fungsi Strategis.....	6
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	6
1.4. Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo	7
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV	47
PENUTUP.....	47
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	47
4.2. Permasalahan/Kendala.....	47
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.....	6
Table 1.3. Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo	8
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kominfo Kab. Kebumen	11
Tabel 2.2. IKU Dinas Kominfo Tahun 2025	13
Tabel 2.3. Target Indikator Sasaran Strategis 2025	14
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025	14
Tabel 2.5. Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2025	15
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2 Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025	20
Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3.4. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran	27
Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	28
Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
Tabel 3 8. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	38
Table 3.9. Data Realisasi Anggaran 2025	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. .Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	3
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas setiap perangkat daerah dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Adapun dasar hukum penyusunan antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kinerja kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 2) Menyajikan informasi kinerja secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja;
- 3) Menjadi alat evaluasi dan bahan pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan kinerja, serta peningkatan kualitas program di tahun berikutnya;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kominfo, maka Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

- 1) Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang

statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Fungsi:

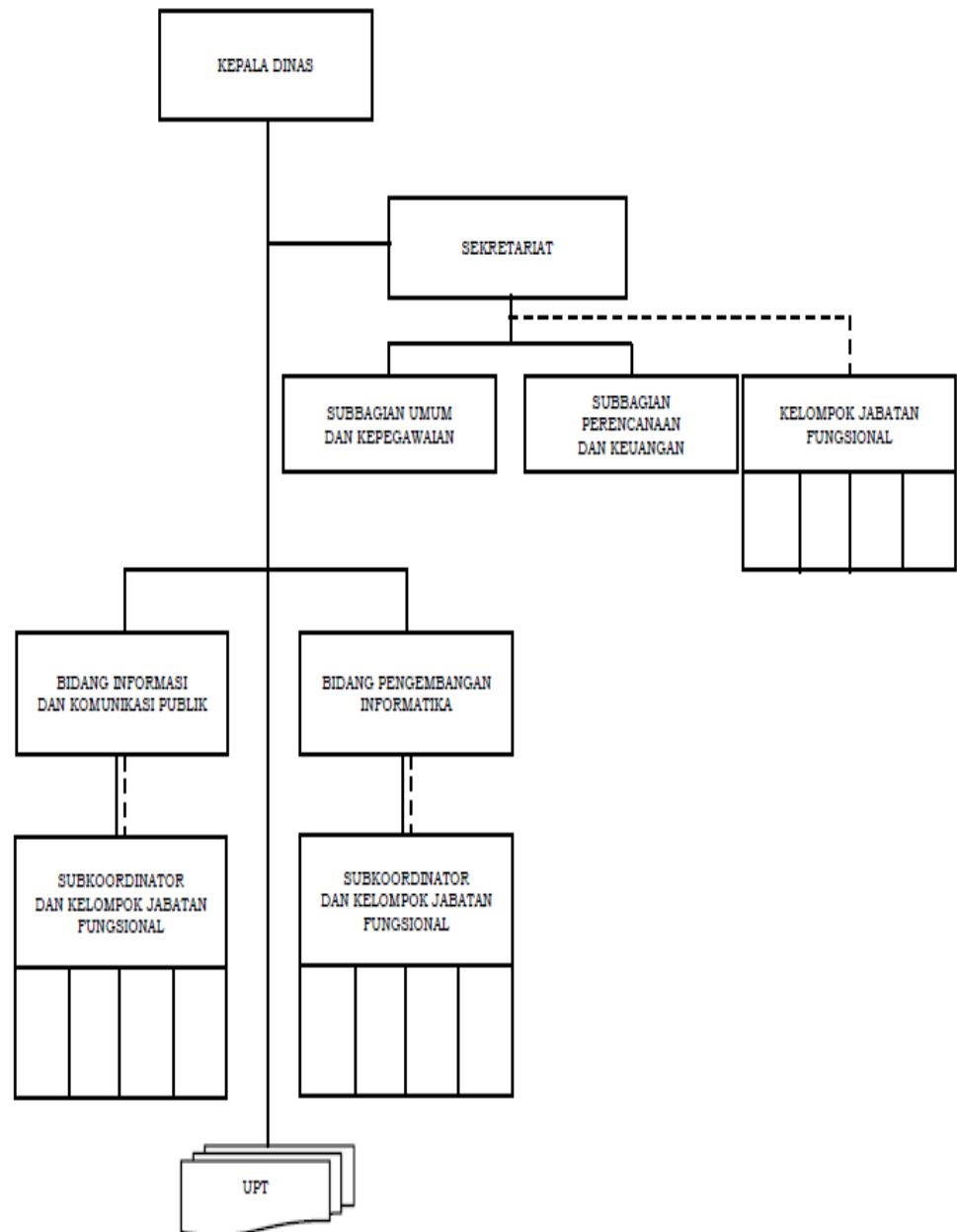
- a) penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- b) perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- c) pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- d) pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- e) pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
- f) pelaksanaan administrasi dinas;
- g) pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sesuai

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 tahun 2021 terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - a) Subkoordinator Informasi Publik;
 - b) Subkoordinator Komunikasi Publik; dan
 - c) Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik;
- 4) Bidang Pengembangan Informatika, terdiri atas:
 - a) Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika;
 - b) Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data; dan
 - c) Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. .Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber: Perbup Nomor 122 Tahun 2021

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik. Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bidang Pengembangan Informatika

Bidang Pengembangan Informatika di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan

informatika. Susunan organisasi Bidang Pengembangan Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

4) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian, sampai dengan Bulan Desember 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 23 orang, PPPK 44 orang, dan non ASN sebanyak 6 orang.

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA	14	1	15
4	D3	8	-	8
5	S1	19	22	41
6	S2	1	2	3
Jumlah		38	29	67

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kebumen, 2025

Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mewujudkan pelayanan prima. Berdasarkan tabel, tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak yaitu 41 orang atau sebesar 61,19% yang terdiri dari 19 laki-laki dan 22 perempuan sedangkan tingkat pendidikan SMA 15 orang, D3 8 orang, dan S2 3 orang.

Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Personil
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	10	6	16
4	Golongan IV	1	3	4
5	PPPK	28	16	44
	Jumlah	32	35	67

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kebumen, 2025

Dari tabel 2.2 di atas dapat di lihat bahwa ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berjumlah 68 orang yang terdiri dari 23 PNS dan 45 PPPK. Selain ASN, terdapat 6 pegawai Non ASN.

1.2. Fungsi Strategis

Fungsi strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen berlandaskan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah:

Menyediakan dan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah;

- 1) Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Mengelola komunikasi dan informasi publik;
- 3) Menjamin keamanan informasi dan layanan persandian
- 4) Mewujudkan tata kelola Satu Data Kebumen untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Dengan fungsi strategis ini, Dinas Kominfo memiliki peran penting sebagai penggerak transformasi digital dan pilar penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kebumen.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Urusan komunikasi dan informatika:
 - a) Belum meratanya akses layanan internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah;
 - b) Infrastruktur TIK pemerintah terbatas dan belum terintegrasi;
 - c) Pengelolaan informasi publik juga masih memerlukan penguatan, terutama dalam konsistensi penyediaan informasi yang akurat,

cepat, dan terkoordinasi antar-perangkat daerah.

2) Urusan Statistik:

- a) Belum memadainya kualitas dan kelengkapan data sektoral yang disampaikan oleh perangkat daerah, baik dari aspek validitas, ketepatan waktu, maupun keseragaman format dan metadata. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi Satu Data Daerah serta penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*).
- b) Koordinasi dan sinkronisasi antara produsen data, wali data, dan pembina data juga masih perlu diperkuat agar pengelolaan statistik sektoral dapat berjalan lebih efektif, standar, dan terintegrasi.

3) Urusan persandian:

- a) Meningkatnya ancaman keamanan siber yang belum seluruhnya dapat diimbangi dengan kesiapan perangkat daerah dalam menerapkan standar keamanan informasi;
- b) Kesadaran terhadap pentingnya keamanan data, termasuk penggunaan media komunikasi yang aman, masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko kebocoran atau kerusakan data pemerintah daerah.

1.4. Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo

Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 1.3. Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Dinas Kominfo

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Telah dilakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja. Kesimpulannya tidak ditemukan crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja. Crosscutting ditemukan pada kinerja antar subkegiatan. Peralatan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik diadakan di subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Pohon Kinerja
2	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan dalam dokumen Pengukuran Kinerja 2024 tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan (IKU) dan tidak menyajikan atau memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya.	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Dokumen Pengukuran Kinerja 2025 menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan (IKU) dan menyajikan atau memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya.	Pengukuran Kinerja
3	Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2024 yang dipublikasikan tidak menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan (IKU) dan tidak menyajikan atau memberikan	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi	Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menyajikan hasil triwulan atas target kinerja yang diperjanjikan (IKU) dan menyajikan atau memberikan rekomendasi/strategi perubahan untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya	Pengukuran Kinerja

	rekomendasi/strategi perubahan untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	perubahan atas capaian kinerjanya.		
4	LKJIP tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerjanya dan tidak melampirkan analisis perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerjanya dan tidak melampirkan analisis perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya di BAB III.	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) 2024 telah menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja masing-masing IKU di BAB III dan melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	LKjIP 2024
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya Pengukuran Kinerja TW 1-4 2024 tidak menyajikan atau memberikan rekomendasi/strategi perubahan untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb	Melaksanakan evaluasi akuntablilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menyajikan atau memberikan rekomendasi/strategi perubahan untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU.	Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen perencanaan jangka menengah suatu instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, serta arah kebijakan untuk kurun waktu 5 tahun.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". Adapun untuk misi pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen adalah misi ke-1 yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi".

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen beserta dengan indikator-indikator kinerjanya, antara lain sebagai berikut:

Tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- b. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel;
- c. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel

Sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan *website* satu data;
- b. Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi;
- c. Meningkatnya tata kelola SPBE.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00
		Meningkatnya pengelolaan web site satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	Nilai	63,65	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
		Meningkatnya layanan administrasi desa dan kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	10,00	16,74	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	100,00
3.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel		Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60
		Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Kebumen Tahun 2025

2) Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja pada tahun 2025 diarahkan untuk menilai capaian terhadap tujuan strategis, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel, dan terwujudnya birokrasi yang kapabel. Sasaran strategis yang diukur mencakup meningkatnya pengelolaan *website* satu data, meningkatnya layanan administrasi desa dan kelurahan yang berbasis teknologi informasi, dan meningkatnya tata kelola SPBE.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2. IKU Dinas Kominfo Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
	Meningkatnya pengelolaan web site satu data	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP	%	100,00
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00
	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	%	100,00
3	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,55
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,55

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Kebumen Tahun 2025

3) Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah menetapkan IKU penyelenggaraan urusan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Target Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Target Indikator Sasaran Strategis 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP	%	100,00
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	%	100,00
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,55

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang berpedoman pada IKU dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 yang berisi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2025. Rincian indikator kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan
1	Tujuan :			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
	Sasaran :			
	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP	%	100,00

2	Tujuan :			
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00
	Sasaran :			
	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/kelurahan	%	100,00
3	Tujuan :			
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,55
	Sasaran :			
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,55

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Dinas Komifo Kabupaten Kebumen didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	4.602.874.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	33.640.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	3.097.870.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 kegiatan	205.572.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	59.001.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	35unit	390.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	553.791.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	263.000.000
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	38,82%	4.019.901.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dalam kondisi baik	198 OPD dan Desa	4.019.901.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Indeks SPBE	3,86	2.766.870.000
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dengan baik	100 aplikasi	2.766.870.000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP	100%	33.746.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	33.746.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100%	214.687.000
	Penyelenggaraan	Jumlah Desa dan	460 Desa	214.687.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	dan Kelurahan	

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didukung dengan anggaran perubahan sebesar Rp11.638.078.000,- dengan rincian belanja operasi Rp10.610.610.000,- dan belanja modal Rp1.027.468.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran. Akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari system penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah dilaksanakan melalui reviu internal yang dipimpin oleh Kepala Dinas pada Rabu, 21 Januari 2025, yang diikuti oleh pejabat struktural, ketua tim, dan staf di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, guna memastikan kesesuaian substansi, keterpaduan data, serta akuntabilitas kinerja yang disajikan. Adapun dokumentasi dan bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas dapat dilihat pada link [Reviu Internal LKjIP 2025](#).

Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Adapun capaian kinerja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
3	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,55	NA	NA	NA	Tidak dilakukakn evaluasi SPBE oleh KepmenPAN-RB nomor 663 Tahun 2024
Kinerja Organisasi (Rata-Rata Nilai)						100,00	Baik	Data diolah dari standar PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Tahun 2025, KemenPAN-RB tidak melakukan evaluasi SPBE sehingga nilai Indeks SPBE Tahun 2025 tidak tersedia (NA). Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah Tahun 2025 dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengikuti Pemantauan SPBE Tahun 2025, karena hanya ditujukan bagi instansi yang menjadi target lokus pembinaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut. Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi). Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) mulai tahun 2026.

Indeks SPBE merupakan instrumen pengukuran penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sedangkan Indeks Pemerintah Digital merupakan pengembangan dari Indeks SPBE dengan cakupan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya menilai tata kelola dan sistem, tetapi juga dampak transformasi digital terhadap kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Formulasi perhitungan Indeks SPBE diperoleh dari domain: Kebijakan SPBE (bobot 13%), Tata Kelola SPBE (bobot 25%), Manajemen SPBE (bobot 16,5%), dan Layanan SPBE (bobot 45,5%), sedangkan formulasi perhitungan Indeks Pemerintah Digital diperoleh dari domain: Tata Kelola dan Manajemen (bobot 10%), Penyelenggara (bobot 10%), Data (bobot 15%), Keamanan Siber (bobot 15%), Teknologi Digital (bobot 10%), Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15%), dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 25%).

Formulasi pengukuran indikator Persentase OPD yang Mengisi

Website Satu Data Sesuai SOP diperoleh dari jumlah OPD yang mengisi *website* satu data sesuai SOP dibagi dengan jumlah OPD di Kabupaten Kebumen dikalikan 100%. Pada September Tahun 2025, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 24 Badan/Dinas telah mengisi Website Satu Data sesuai SOP di Portal Satu Data Kebumen dari target 50 OPD sehingga capaian kinerjanya 100% (baik).

Formulasi pengukuran indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan diperoleh dari jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan TTE dalam Layanan Administrasi dibagi dengan jumlah desa dan kelurahan di Kab. Kebumen dikalikan 100%. Berdasarkan data pada akhir Desember Tahun 2025, sebanyak 460 desa/kelurahan dari target 460 desa/kelurahan di Kab. Kebumen telah menerapkan TTE sehingga capaian kinerjanya 100% (baik).

Adapun dampak dari masing-masing indikator adalah:

- a. Meningkatnya pengelolaan *website* Satu Data berdampak pada tersedianya data yang lebih terintegrasi, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah;
 - b. Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi berdampak pada percepatan proses pelayanan, peningkatan akurasi data, serta kemudahan akses layanan bagi Masyarakat;
 - c. Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel.
2. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	61,30	70,65	115,25	83,48	94,35	113,02	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,45	3,70	107,25	3,50	4,07	116,29	3,55	NA	NA

Bila dilihat dari tabel 3.3, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kominfo sudah mencapai 100% (baik). Capaian indikator Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP menunjukkan capaian yang konsisten selama periode tahun 2023–2025. Target dan realisasi setiap tahun sama-sama mencapai 100%, dengan capaian kinerja 100% dan kategori baik. Capaian indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan dari 70,65% pada tahun 2023 menjadi 100,00% pada tahun 2025. Begitu juga dengan capaian indeks SPBE yakni 3,70 pada tahun 2023 menjadi 4,07 di Tahun 2024, sedangkan indeks SPBE Tahun 2025 tidak tersedia karena KemenPAN-RB tidak melakukan evaluasi SPBE. Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mampu menjaga stabilitas dan konsistensi kinerja, serta menunjukkan peningkatan pada indikator strategis tertentu, khususnya pada indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik di Tahun 2025. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas program dan layanan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kominfo Kab. Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	NA	3,60	NA

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan capaian 100% untuk indikator Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP dan indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan. Sementara indikator capaian Indeks SPBE Tahun 2024 sudah mencapai 113% jika dibandingkan dengan target jangka menengah. Adapun Secara umum, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berada pada jalur pencapaian sasaran jangka menengah.

Tren capaian kinerja indikator Persentase OPD yang mengisi Website Satu Data sesuai SOP stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan pengelolaan data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan OPD dalam mengunggah data secara terstandar.

Meskipun demikian, untuk memastikan tercapainya target akhir yang telah ditetapkan, diperlukan upaya kerja keras, koordinasi intensif, serta penguatan pemahaman SOP di setiap OPD. Dengan mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan konsistensi pengisian data, target akhir pengelolaan Website Satu Data dapat tercapai secara optimal.

Capaian indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan, sosialisasi, dan implementasi teknologi informasi di tingkat desa dan kelurahan telah berjalan dengan baik, serta semakin banyak desa/kelurahan yang memanfaatkan TTE untuk mempercepat dan menstandarkan layanan administrasi. Meskipun target sasaran jangka menengah sudah tercapai, konsistensi penerapan, penguatan pemahaman dan penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan tetap diperlukan untuk mewujudkan layanan administrasi yang efisien, akurat, dan transparan.

Berdasarkan capaian Indeks SPBE selama beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang konsisten. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penguatan tata kelola SPBE, integrasi sistem elektronik, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah telah berjalan efektif. Meskipun target sasaran jangka menengah telah terlampaui, tetap diperlukan upaya kerja keras dan konsistensi pelaksanaan agar kinerja yang telah dicapai tetap terjaga dan tidak menurun. Walaupun pada tahun 2025 evaluasi resmi Indeks SPBE tidak dilakukan oleh KemenPAN-RB karena pada tahun 2026 Indeks SPBE akan mengalami pengembangan menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang mencakup penilaian lebih komprehensif terhadap transformasi digital pemerintah. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan kinerja SPBE saat ini tetap menjadi prioritas strategis untuk memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi perubahan indikator dan untuk mendukung tercapainya tujuan transformasi digital yang lebih luas.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi tingkat provinsi dan nasional dimaksudkan untuk memperoleh gambaran posisi dan kinerja Dinas Kominfo Kab. Kebumen dalam konteks yang lebih luas, sekaligus menilai daya saing dan kontribusi daerah terhadap pencapaian pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja daerah telah sejalan, melampaui, atau masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, sehingga menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan, identifikasi praktik baik (*best practices*), serta perumusan strategi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan regional dan nasional.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Perbandingan rata-rata			
				Nasional	Kementrian	Prov	Kab
1	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	NA	NA	NA	NA
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100,00	NA	NA	NA	NA
3	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	NA	NA	NA	NA	NA

Berdasarkan Tabel 3.5, Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tidak tersedia karena tidak ada evaluasi SPBE dari KemenPAN-RB, sedangkan perbandingan capaian indikator Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP dan Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan dengan nilai rata-rata Nasional, Kementrian, Provinsi dan Kabupaten lain tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	Faktor Keberhasilan: a. Meningkatnya kepatuhan OPD dalam mengunggah dan memperbarui data sesuai dengan standar, metadata, dan prosedur yang telah ditetapkan. b. Peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembinaan, koordinasi, serta pendampingan teknis kepada OPD sebagai produsen data	Upaya untuk meningkatkan kinerja yang akan datang: a. Penguatan pembinaan OPD b. Monitoring dan evaluasi pengisian data Satu Data
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	Faktor Keberhasilan: a. adanya fasilitasi, pendampingan teknis, dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan b. ketersediaan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang memadai	Upaya untuk meningkatkan kinerja yang akan datang: a. peningkatan pendampingan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa dan kelurahan b. penguatan infrastruktur dan dukungan teknis c. monitoring dan evaluasi penerapan TTE secara berkala guna memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan

3	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks SPBE	3,55	NA	NA	Tidak dilaksanakannya evaluasi SPBE tahun 2025 oleh Kementerian PANRB. Adapaun Faktor Keberhasilan: a. Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola b. Layanan SPBE yang Terintegrasi	Melakukan pemetaan kesesuaian indikator SPBE terhadap indikator Pemerintah Digital guna memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengikuti kebijakan evaluasi pemerintah digital yang baru
---	-------------------------------	-------------	------	----	----	---	---

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran keluaran i

RAKi = realisasi anggaran keluaran i

CKi = capaian keluaran

Capaian tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran.

Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				11.638.078.000	11.305.294.109	97,14%	99,10%
	Persentase OPD yang Mengisi <i>website</i> Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	100,00	100,00	100,00				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	3,55	NA	NA				
	Meningkatnya Indeks SPBE	3,55	NA	NA				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 2,86% dari pagu anggaran *netto* (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Dinas Komunikasi Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada Lampiran.

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam menghasilkan capaian kinerja. Efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja yang memenuhi bahkan melampaui target, dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau proporsional terhadap pagu yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa output dan outcome dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya. Efisiensi kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang semakin selaras antara target kinerja dan kebutuhan pendanaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang lebih terfokus dan terintegrasi, sehingga menghindari duplikasi program;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan;
- 4) Penguatan pengendalian internal, yang mendorong ketepatan sasaran dan ketertiban administrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi belum optimal, yang disebabkan oleh penyesuaian kebijakan, perubahan prioritas pembangunan, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja.

Selain analisis penggunaan sumber daya anggaran dilakukan juga analisis Sumber Daya Manusia (SDM). Pada Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, jumlah pegawai yang dibutuhkan 170 ASN, namun realisasinya hanya 38 ASN atau realisasi SDM 2,23% dengan realisasi kinerja 100%. Dapat disimpulkan penggunaan SDM sangat efisien. Namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan. Tabel kebutuhan SDM dinas Kominfo disajikan pada Lampiran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3 8. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya pengelolaan website satu data		Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Menunjang
2	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi		Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	100,00%	Menunjang
			Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	100,00%	Menunjang
			Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Desa dan	460 Desa dan Kelurahan	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
			Kelurahan dan kelurahan		
3	Meningkatnya Tata Kelola SPBE		Indeks SPBE	NA	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 unit	Menunjang
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Menunjang
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Indeks PPID	100%	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Publik			
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik	269 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan	Menunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	NA	
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	9 paket	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	105 aplikasi	Menunjang

Adapun untuk capaian kegiatan, dari 11 kegiatan rata-rata capaian kinerjanya 100%. Target kinerja kegiatan adalah target pada DPPA TA 2025. Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja 2026, RKA 2026, RKAP 2025, DPA 2025, DPPA 2025, LKJIP 2024, Renstra Dinas Kominfo 2025-2029, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Rakor POP;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 35 unit realisasi 35 unit untuk mendukung operasional kegiatan bidang informasi pengelolaan komunikasi publik yaitu pengadaan peralatan audio (headphone dan headset) 9 unit, peralatan video dan film (lensa kamera, memori kamera, kamera, mixer video, mixer audio) 15 unit, AC 4 unit, laptop 4 unit dan alat komunikasi 3 unit
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan realisasi 12 bulan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan 21 unit kendaraan

roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan rehabilitasi gedung kantor;

8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik target 198 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik, realisasi 269 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan. Kegiatan ini terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan hasil 11.315 jam siar Kebumen TV dan Radio In FM selama 1 tahun; 2) Pelayanan Informasi Publik dengan hasil 198 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik; dan 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Media Komunitas dengan realisasi 1 kali pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat 1 kali) dan 3 kali pertemuan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional). Tahun 2025, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen meraih penghargaan informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyampaikan, menyediakan, menguasai Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output pemeliharaan 105 aplikasi aktif pendukung SPBE dari target 100 aplikasi. Terdiri dari 2 subkegiatan yakni 1) Penyelenggaraan Jaringan intra Pemerintah Daerah dan 2) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
10. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output menyediakan 1 dokumen statistik sektoral. Terdiri dari 1 subkegiatan yakni Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan output 460 Desa dan Kelurahan dan kelurahan yang

menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan dan kelurahan. Terdiri dari 2 Subkegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebab keberhasilan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yaitu komitmen pimpinan yang tinggi dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, program yang dilaksanakan antara lain:

1. Penyelenggaraan Satu Data

Implementasi Satu Data di Kabupaten Kebumen telah mencapai langkah signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2021. Selain itu, juga telah terbentuk Forum Satu Data Kebumen yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan data, Kepala Dinas Kominfo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Inovasi ini melibatkan pembentukan portal resmi satudata.kebumenkab.go.id, yang menjadi sarana utama untuk menampung, mengelola, dan menyebarluaskan data. Portal Satu Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah (100%) di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menciptakan landasan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang kokoh untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

➤ Faktor Pendorong

- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021: Adanya Perbup yang mengatur Satu Data Kabupaten Kebumen menjadi pendorong utama untuk implementasi konsep Satu Data. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Satu Data.
- Forum Satu Data Kebumen: Keberadaan SK Bupati yang membentuk Forum Satu Data memberikan wadah formal bagi

kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder dalam pengelolaan data.

- SK Kepala Dinas Kominfo yang mengatur petunjuk teknis memberikan pedoman operasional yang jelas untuk pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dan kualitas data.
- Portal resmi satudata.kebumenkab.go.id menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara terpusat dan terintegrasi.

➤ Hambatan

- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan Sumber Manusia (SDM) atau personil yang khusus menangani pengumpulan data di OPD menjadi hambatan utama dalam pengembangan pengelolaan data;
- Tingkat kesadaran dan keterlibatan *stakeholder*: tepatnya respon OPD dalam pemenuhan data, termasuk kualitas data masih belum memungkinkan ditangani.

➤ Upaya Untuk Meningkatkan

- Optimalisasi Sumber Daya: peningkatan kompetensi SDM;
- Sosialisasi dan pelibatan *stakeholder*: Melaksanakan program sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2. Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa dan Kelurahan

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala Desa dan Kelurahan, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala

Desa dan Kelurahan adalah percepatan layanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat Desa dan Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Per Januari 2025 sebanyak 460 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen telah diterbitkan tanda tangan elektronik dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelayanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan *online* kebumen. Sebagai monitoring atas penggunaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

➤ Faktor Pendorong

Faktor pendorong paling utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen adalah komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah hal ini dibuktikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk menandatangani dokumen elektronik. Selain factor utama tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendorong lain:

- Dukungan Regulasi: Adanya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, seperti peraturan yang memfasilitasi legalitas dan pengakuan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi.
- Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pendorong signifikan untuk mengadopsi tanda tangan elektronik, memungkinkan proses administratif menjadi lebih efisien dan modern.
- Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kolaborasi dengan

Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara menjadi pendorong penting, karena memperkuat dukungan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk implementasi tanda tangan elektronik.

➤ Hambatan

- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat Desa dan Kelurahan dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
- Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah Desa dan Kelurahan merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

➤ Upaya untuk meningkatkan:

- Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat Desa dan Kelurahan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
- Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala Desa dan Kelurahan dan masyarakat Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE

dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Jumlah indikator penilaian pada SPBE sebanyak 47, dan indikator pada Pemdi sebanyak 35. Penilaian pada Tahun 2024 masih menggunakan Indeks SPBE, Tahun 2025 tidak ada evaluasi SPBE dari KemenPAN-RB, sedangkan mulai tahun 2026 menggunakan Indeks Pemdi.

➤ **Faktor Pendorong**

Beberapa faktor pendorong terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Kebumen antara lain:

- Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola: Adanya kebijakan internal yang mengatur arsitektur, peta rencana, manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi menjadi pendorong utama penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Layanan SPBE yang Terintegrasi: Keunggulan dalam integrasi layanan administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan layanan publik menggunakan aplikasi berbagi pakai serta aplikasi internal menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

➤ **Upaya untuk meningkatkan:**

- Mengembangkan atau mengadopsi *tools* berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK.

3.1. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2025 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD Tahun 2025 untuk Dinas Kominfo sebesar Rp 11.638.078.000,- dengan realisasi Rp

11.305.294.109,- atau serapan 97,14%. Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Table 3.9. Data Realisasi Anggaran 2025

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.602.874.000	4.358.001.323	94,68
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.640.000	32.461.711	96,50
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.870.000	2.941.113.105	94,94
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.572.000	202.050.925	98,29
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.001.000	58.528.666	99,20
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.000.000	377.185.932	96,71
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553.791.000	490.152.596	88,51
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.000.000	256.508.388	97,53
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	4.019.901.000	3.981.816.175	99,05

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
PUBLIK			
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.019.901.000	3.981.816.175	99,05
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.766.870.000	2.731.627.602	98,73
Kegiatan Pengelolaan <i>e- government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.766.870.000	2.731.627.602	98,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	33.746.000	32.262.998	95,61
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.746.000	32.262.998	95,61
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	214.687.000	201.586.011	93,90
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.687.000	201.586.011	93,90
JUMLAH	11.638.078.000	11.305.294.109	97,14

Berdasarkan tabel 3.9, realisasi keuangan TA 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sebesar 97,14%. Dari 5 program, program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang

persentase penyerapannya paling tinggi yakni 99,05% dan dari 11 kegiatan, penyerapan tertinggi ada pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 99,05% dan terendah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yakni 88,51% karena tagihan listrik bulan Desember belum diterbitkan oleh penyedia layanan sehingga pembayaran listrik terealisasi hanya 11 bulan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2025 dapat dilihat dari capaian IKU. Pertama, persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data, capaiannya 100,00% (baik). Kedua, Persentase Desa dan Kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, capaiannya 100,00% (baik). Ketiga, indeks SPBE tahun 2025 tidak tersedia karena tidak ada evaluasi SPBE dari KemenPAN-RB. Realisasi Kinerja Dinas Kominfo Kab. Kebumen Tahun 2025 tersebut masuk kriteria penilaian realisasi kinerja 100% (baik) dengan realisasi anggaran Rp11.305.294.109,- (97,14%) dari pagu Rp11.638.078.000,-

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2025 meliputi:

- Urusan Komunikasi dan Informatika: audit teknologi dan informasi secara eksternal di Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan, sehingga berdampak pada belum terpenuhinya salah satu indikator penilaian dalam Indeks SPBE;
- Urusan Statistik: tingkat keaktifan Perangkat Daerah dalam mengisi Portal Satu Data belum optimal;
- Urusan Persandian: Kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi di tingkat desa masih kurang.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi peningkatan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen di masa datang sebagai berikut:

- Urusan Komunikasi dan Informatika: melaksanakan audit teknologi dan informasi secara eksternal;
- Urusan Statistik: pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik;
- Urusan Persandian: sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk meningkatkan pemahaman keamanan informasi.

Demikian LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun. Semoga bermanfaat.



Kebumen, 28 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197011071994032006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6, Kode Pos 54313 Telp/Fax (0287) 383349
Laman kominfo.kebumenkab.go.id Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	85,00				85,00
	Sasaran :								
	Meningkatnya pengelolaan <i>website</i> satu data	Persentase OPD yang mengisi <i>website</i> satu data sesuai SOP	%	100,00	100,00			100,00	
2	Tujuan :								
	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00	74,00				74,00
	Sasaran :								
	Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa/kelurahan	%	100,00	100,00				100,00
3	Tujuan :								
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,60	3,60				3,60
	Sasaran :								
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,60	3,60				3,60



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.445.772.000,-	Rp4.602.874.000,-	
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.746.095.000,-	Rp4.019.901.000,-	
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program	Rp. 2.836.396.000,-	Rp2.766.870.000,-	
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program	Rp. 45.000.000,-	Rp33.746.000,-	
5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 106.000.000,-	Rp108.687.000,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197011071994032006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.602.874.000		4.602.874.000	100,00	100,00	3.928.521.352	429.479.971	4.358.001.323	94,68	100,00	5,32	0,00		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.640.000		33.640.000	100,00	100,00	30.864.211	1.597.500	32.461.711	96,50	100,00	3,50	0,00		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.996.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	25.996.000	100,00	100,00	24.326.046	1.110.000	25.436.046	97,85	100,00	2,15	0,00		
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.644.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	7.644.000	100,00	100,00	6.538.165	487.500	7.025.665	91,91	100,00	8,09	0,00		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.870.000		3.097.870.000	100,00	100,00	2.652.214.436	288.898.669	2.941.113.105	94,94	100,00	5,06	0,00		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.078.501.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	3.078.501.000	100,00	100,00	2.636.171.141	288.502.669	2.924.673.810	95,00	100,00	5,00	0,00		
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.369.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	19.369.000	100,00	100,00	16.043.295	396.000	16.439.295	84,87	100,00	15,13	0,00	Honorarium pengelola keuangan tidak dapat direalisasikan meskipun telah tercantum dalam DPA, karena perhitungan anggaran telah ditetapkan berdasarkan Analisis Standar Biaya (ASB) yang bersifat baku dan tidak memungkinkan dilakukan pergeseran atau penyesuaian anggaran di luar ketentuan tersebut	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.572.000		205.572.000	100,00	100,00	113.697.580	88.353.345	202.050.925	98,29	100,00	1,71	0,00		
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	205.572.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	205.572.000	100,00	100,00	113.697.580	88.353.345	202.050.925	98,29	100,00	1,71	0,00		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.001.000		59.001.000	100,00	100,00	54.079.866	4.448.800	58.528.666	99,20	100,00	0,80	0,00		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	4.000.000	100,00	100,00	3.995.000		3.995.000	99,88	100,00	0,12	0,00		
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.900.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	18.900.000	100,00	100,00	17.787.500	968.000	18.755.500	99,24	100,00	0,76	0,00		
JUMLAH		11.638.078.000		11.638.078.000	100,00	100,00	8.801.982.862	2.503.311.247	11.305.294.109	97,14	100,00	2,86	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.100.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	8.100.000	100,00	100,00	5.608.240	2.490.800	8.099.040	99,99	100,00	0,01	0,00		
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	4.000.000	100,00	100,00	3.750.000	250.000	4.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.001.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.001.000	100,00	100,00	8.704.120		8.704.120	96,70	100,00	3,30	0,00		
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	15.000.000	100,00	100,00	14.235.006	740.000	14.975.006	99,83	100,00	0,17	0,00		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.000.000		390.000.000	100,00	100,00	377.185.932		377.185.932	96,71	100,00	3,29	0,00		
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	390.000.000	100,00	100,00	377.185.932		377.185.932	96,71	100,00	3,29	0,00		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.791.000		553.791.000	100,00	100,00	445.305.939	44.846.657	490.152.596	88,51	100,00	11,49	0,00		
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.494.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	1.494.000	100,00	100,00	1.485.000		1.485.000	99,40	100,00	0,60	0,00		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	450.000.000	100,00	100,00	355.123.039	31.368.157	386.491.196	85,89	100,00	14,11	0,00	Pembayaran rekening listrik hanya terealisasi selama 11 bulan karena tagihan bulan Desember belum diterbitkan oleh penyedia layanan hingga akhir tahun anggaran.	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.297.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	102.297.000	100,00	100,00	88.697.900	13.478.500	102.176.400	99,88	100,00	0,12	0,00		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.000.000		263.000.000	100,00	100,00	255.173.388	1.335.000	256.508.388	97,53	100,00	2,47	0,00		
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	90.000.000	100,00	100,00	88.455.734	1.335.000	89.790.734	99,77	100,00	0,23	0,00		
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	3.000.000	100,00	100,00	2.958.500		2.958.500	98,62	100,00	1,38	0,00		
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	50.000.000	100,00	100,00	49.875.000		49.875.000	99,75	100,00	0,25	0,00		
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	120.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD	120.000.000	100,00	100,00	113.884.154		113.884.154	94,90	100,00	5,10	0,00		
JUMLAH		11.638.078.000		11.638.078.000	100,00	100,00	8.801.982.862	2.503.311.247	11.305.294.109	97,14	100,00	2,86	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bangunan Lainnya		Perubahan												
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.019.901.000		4.019.901.000	100,00	100,00	2.998.017.542	983.798.633	3.981.816.175	99,05	100,00	0,95	0,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.019.901.000		4.019.901.000	100,00	100,00	2.998.017.542	983.798.633	3.981.816.175	99,05	100,00	0,95	0,00		
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	62.903.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	62.903.000	100,00	100,00	53.962.880	8.364.202	62.327.082	99,08	100,00	0,92	0,00		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	811.624.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	811.624.000	100,00	100,00	561.493.810	241.291.634	802.785.444	98,91	100,00	1,09	0,00		
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.145.374.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	3.145.374.000	100,00	100,00	2.382.560.852	734.142.797	3.116.703.649	99,09	100,00	0,91	0,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.766.870.000		2.766.870.000	100,00	100,00	1.836.221.459	895.406.143	2.731.627.602	98,73	100,00	1,27	0,00		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.766.870.000		2.766.870.000	100,00	100,00	1.836.221.459	895.406.143	2.731.627.602	98,73	100,00	1,27	0,00		
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	223.382.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	223.382.000	100,00	100,00	145.070.800	75.062.694	220.133.494	98,55	100,00	1,45	0,00		
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.543.488.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	2.543.488.000	100,00	100,00	1.691.150.659	820.343.449	2.511.494.108	98,74	100,00	1,26	0,00		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	33.746.000		33.746.000	100,00	100,00	22.276.498	9.986.500	32.262.998	95,61	100,00	4,39	0,00		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.746.000		33.746.000	100,00	100,00	22.276.498	9.986.500	32.262.998	95,61	100,00	4,39	0,00		
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	33.746.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	33.746.000	100,00	100,00	22.276.498	9.986.500	32.262.998	95,61	100,00	4,39	0,00		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	214.687.000		214.687.000	100,00	100,00	16.946.011	184.640.000	201.586.011	93,90	100,00	6,10	0,00		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	214.687.000		214.687.000	100,00	100,00	16.946.011	184.640.000	201.586.011	93,90	100,00	6,10	0,00		
JUMLAH		11.638.078.000		11.638.078.000	100,00	100,00	8.801.982.862	2.503.311.247	11.305.294.109	97,14	100,00	2,86	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.535.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	3.535.000	100,00	100,00	2.700.000	400.000	3.100.000	87,69	100,00	12,31	0,00	Sisa anggaran terjadi sebagai dampak dari upaya efisiensi anggaran karena adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian output yang telah ditetapkan	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.152.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya),APBD Perubahan	211.152.000	100,00	100,00	14.246.011	184.240.000	198.486.011	94,00	100,00	6,00	0,00		
JUMLAH		11.638.078.000		11.638.078.000	100,00	100,00	8.801.982.862	2.503.311.247	11.305.294.109	97,14	100,00	2,86	0,00		

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=[(6*5)-7]	10=6*5	11=(SUM9/SUM10)*100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	4.602.874.000	4.358.001.323	94,68	455.929.398.677	460.287.400.000	99,05
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 bulan	12 bulan	100	33.640.000	32.461.711	96,50	3.331.538.289	3.364.000.000	99,04
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	3.097.870.000	2.941.113.105	94,94	306.845.886.895	309.787.000.000	99,05
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	205.572.000	202.050.925	98,29	20.355.149.075	20.557.200.000	99,02
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	59.001.000	58.528.666	99,20	5.841.571.334	5.900.100.000	99,01
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	390.000.000	377.185.932	96,71	38.622.814.068	39.000.000.000	99,03
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	2 bulan	100	553.791.000	490.152.596	88,51	54.888.947.404	55.379.100.000	99,11
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	2 bulan	100	263.000.000	256.508.388	97,53	26.043.491.612	26.300.000.000	99,02

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=[(6*5)-7]	10=6*5	11=(SUM9/SUM10)*100%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	38,82	52,75	135,86	4.019.901.000	3.981.816.175	99,05	542.161.933.685	546.143.749.860	99,27
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik	198	269	135,86	4.019.901.000	3.981.816.175	99,05	542.161.933.685	546.143.749.860	99,27
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,86	NA	NA	2.766.870.000	2.731.627.602	98,73	0	NA	NA
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100	105	105	2.766.870.000	2.731.627.602	98,73	287.789.722.398	290.521.350.000	99,06
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100	100	100	33.746.000	32.262.998	95,61	3.342.337.002	3.374.600.000	99,04
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1	1	100	33.746.000	32.262.998	95,61	3.342.337.002	3.374.600.000	99,04
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	214.687.000	201.586.011	93,90	21.267.113.98	21.468.700.000	99,06
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	214.687.000	201.586.011	93,90	21.267.113.989	21.468.700.000	99,06
Jumlah					11.638.078.000	11.305.294.109	97,14	1.247.608.879.307	1.258.914.173.416	99,10%

KEBUTUHAN PEGAWAI DINAS KOMINFO TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
1	KEPALA DINAS	1	1	0
2	SEKRETARIS DINAS	1	1	0
3	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	1	0
4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INFORMATIKA	1	1	0
5	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	0
6	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1	0
7	JF PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	2	0	2
8	JF SANDIMAN AHLI MADYA	1	0	1
9	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	2	0	2
10	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	3	1	2
11	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	6	0	6
12	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	1	0	1
13	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	2	0	2
14	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA	3	0	3
15	JF PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	3	0	3
16	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	10	4	6
17	JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	0	0	0
18	JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	3	2	1
19	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	0	6
20	JF MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA	2	0	2
21	JF MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	3	0	3

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
22	JF SANDIMAN AHLI MUDA	2	0	2
23	JF SANDIMAN AHLI PERTAMA	2	0	2
24	JF SANDIMAN PENYELIA	1	0	1
25	JF SANDIMAN MAHIR	1	0	1
26	JF SANDIMAN TERAMPIL	2	0	2
27	JF STATISTISI AHLI MUDA	1	0	1
28	JF STATISTISI AHLI PERTAMA	2	1	1
29	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	0	1
30	JF ARSIPARIS PENYELIA	1	0	1
31	JF ARSIPARIS MAHIR	1	0	1
32	JF ARSIPARIS TERAMPIL	3	0	3
33	JF PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	1	0	1
34	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	1
35	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	1	0	1
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	13	3	10
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	25	1	24
38	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	23	0	23
39	PENGELOLA SIARAN	1	0	1
40	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	6	3	3
41	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	25	0	25
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	4	1	3
JUMLAH		170	22	148



PENGHARGAAN

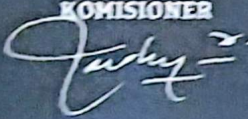
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

KABUPATEN KEBUMEN

INFORMATIF

Dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Semarang, 16 Desember 2025

KOMISIONER

ERMY SRI A., S.SOS

WAKIL KETUA

SETIADI, SH. MH



KETUA

INDRA ASHOKA M., SE, MH

KOMISIONER

SETIAWAN HK., S.KOM

KOMISIONER

MOH. ASROFI, S.PD.I



KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 900.1 / 0043 / 2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

Atas dedikasinya sebagai Badan/Dinas dengan
Pengelolaan Anggaran Terbaik Tahun 2025

Kebumen, 13 Januari 2026

a.n. Bupati Kebumen
Sekretaris Daerah



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto